

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	75.266.500.439,00	66.015.536.431,00	87,71
Surplus (defisit)	(75.266.500.439,00)	(66.015.536.431,00)	87,71

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	64.081.185.662,00	66.015.536.431,00	103,02
Surplus (defisit)	(64.081.185.662,00)	(66.015.536.431,00)	103,02

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 66.015.536.431,00 atau 87,71% dari target sebesar Rp 75.266.500.439,00 naik 3,02% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 64.081.185.662

2.1.1 Pendapatan

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL			
Pendapatan Daerah					

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL		
Pendapatan Daerah				

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 97,54%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 64.394.290.121,00 meningkat sebesar 5,11% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 61.266.109.369,00

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 2,46%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.621.246.310,00 atau sebesar 92,16% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.759.231.100,00 menurun sebesar 42,41% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.815.076.292,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	73.507.269.339,00	64.394.290.121,00	87,60	97,54
	Belanja Pegawai	27.845.074.200,00	27.012.339.435,00	97,01	40,92
	Belanja Barang dan Jasa	45.662.195.139,00	37.381.950.686,00	81,87	56,63
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	1.759.231.100,00	1.621.246.310,00	92,16	2,46
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.654.731.100,00	1.516.889.110,00	91,67	2,30
	Belanja Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.926.000,00	99,93	0,15
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya	4.500.000,00	4.431.200,00	98,47	0,01
Jumlah Belanja		75.266.500.439,00	66.015.536.431,00	87,71	100,00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	61.266.109.369,49	64.394.921.821,00	105,11
	Belanja Pegawai	25.808.052.537,00	27.012.339.435,00	104,67
	Belanja Barang dan Jasa	35.458.056.832,49	37.382.582.386,00	105,43
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	2.815.076.293,00	1.621.246.310,00	57,59
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.909.979.293,00	1.516.889.110,00	79,42
	Belanja Gedung dan Bangunan	577.923.000,00	99.926.000,00	17,29
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya	327.174.000,00	4.431.200,00	1,35
Jumlah Belanja		64.081.185.662,49	66.016.168.131,00	103,02

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.830.520.939,00	35.996.596.844,00	95,15	54,53
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.142.606,00	81.973.748,00	99,79	0,12
	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.673.072,00	7.604.500,00	99,11	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4.892.000,00	4.853.500,00	99,21	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	4.892.000,00	4.892.000,00	100,00	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	3.312.786,00	3.307.500,00	99,84	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	3.312.786,00	3.304.286,00	99,74	0,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.219.962,00	56.171.962,00	99,91	0,09
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	0,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.776.020.088,00	5.411.859.259,00	93,70	8,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.761.216.000,00	5.397.067.215,00	93,68	8,18

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.140.000,00	4.133.000,00	99,83	0,01
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.312.000,00	3.312.000,00	100,00	0,01
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.225.044,00	1.225.000,00	100,00	0,00
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	0,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.312.000,00	3.307.000,00	99,85	0,01
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	975.044,00	975.044,00	100,00	0,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000,00	13.789.000,00		0,02
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.140.000,00	4.135.000,00	99,88	0,01
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.140.000,00	4.134.000,00	99,86	0,01
Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.542.000,00	3.539.000,00	99,92	0,01
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.542.000,00	3.539.000,00	99,92	0,01
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.506.965.820,00	2.393.915.897,00	95,49	3,63
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.721.000,00	45.567.000,00	99,66	0,07
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.247.470,00	254.115.100,00	93,68	0,38
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	228.719.350,00	184.245.550,00	80,56	0,28
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	376.414.000,00	357.518.800,00	94,98	0,54
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	58.560.000,00	47.871.200,00	81,75	0,07
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.526.304.000,00	1.504.598.247,00	98,58	2,28
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.456.000.000,00	1.340.084.800,00	92,04	2,03
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.456.000.000,00	1.340.084.800,00	92,04	2,03
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.901.227.125,00	1.603.008.489,00	84,31	2,43
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.100.000,00	9.981.500,00	98,83	0,02
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.800.000,00	342.047.881,00	88,66	0,52
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.327.125,00	1.250.979.108,00	83,10	1,89
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.515.124.000,00	2.134.654.698,00	84,87	3,23
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.870.000,00	199.088.695,00	57,07	0,30

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	569.628.000,00	373.422.670,00	65,56	0,57
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.520.000,00	154.682.483,00	90,18	0,23
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.425.106.000,00	1.407.460.850,00	98,76	2,13
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	22.292.188.200,00	21.799.802.220,00	97,79	33,02
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.083.858.200,00	21.615.272.220,00	97,88	32,74
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	164.270.000,00	163.510.000,00	99,54	0,25
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44.060.000,00	21.020.000,00	47,71	0,03
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.283.511.100,00	1.213.969.733,00	94,58	1,84
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	43.872.000,00	43.830.938,00	99,91	0,07
	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	427.836.000,00	427.633.952,00	99,95	0,65
	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	449.572.000,00	383.517.922,00	85,31	0,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	362.231.100,00	358.986.921,00	99,10	0,54
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	37.435.979.500,00	30.018.939.587,00	80,19	45,47
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.537.620.000,00	4.959.582.260,00	75,86	7,51
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.381.675.000,00	955.320.480,00	69,14	1,45
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.689.470.000,00	2.659.903.585,00	72,09	4,03
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	960.600.000,00	847.363.845,00	88,21	1,28
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	505.875.000,00	496.994.350,00	98,24	0,75
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.923.728.500,00	2.243.863.861,00	76,75	3,40
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	488.928.000,00	402.521.490,00	82,33	0,61
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	482.928.000,00	370.150.010,00	76,65	0,56
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	769.206.000,00	628.933.503,00	81,76	0,95
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	558.268.500,00	415.067.107,00	74,35	0,63
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	2.700.000,00	2.277.000,00	84,33	0,00
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	621.698.000,00	424.914.751,00	68,35	0,64
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.989.316.000,00	5.963.610.147,00	74,64	9,03
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.374.579.500,00	860.685.181,00	62,61	1,30
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.262.339.500,00	954.519.612,00	75,62	1,45
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.262.339.500,00	988.707.999,00	78,32	1,50
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.262.339.500,00	918.976.827,00	72,80	1,39
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.526.110.000,00	2.016.558.825,00	79,83	3,05
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	298.548.000,00	221.101.703,00	74,06	0,33
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.947.354.250,00	6.734.268.949,00	84,74	10,20
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	3.954.080.000,00	2.815.923.689,00	71,22	4,27

Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.139.682.000,00	3.092.413.000,00	98,49	4,68
Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27.000.000,00	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000,00	216.000.000,00	100,00	0,33
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	584.544.000,00	584.544.000,00	100,00	0,89
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	26.048.250,00	25.388.260,00	97,47	0,04
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.427.873.750,00	5.876.829.357,00	91,43	8,90
Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	809.140.000,00	627.286.357,00	77,53	0,95
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	5.618.733.750,00	5.249.543.000,00	93,43	7,95
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	728.490.000,00	396.865.844,00	54,48	0,60
Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	348.220.000,00	183.267.580,00	52,63	0,28
Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	380.270.000,00	213.598.264,00	56,17	0,32
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	98.480.000,00	93.376.250,00	94,82	0,14
Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	6.000.000,00	4.195.000,00	69,92	0,01
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	92.480.000,00	89.181.250,00	96,43	0,14
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4.783.117.000,00	3.750.542.919,00	78,41	5,68
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	547.235.000,00	421.890.759,00	77,09	0,64
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.350.000,00	3.450.000,00	79,31	0,01
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.552.546.000,00	1.864.944.872,00	73,06	2,83
Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.678.986.000,00	1.460.257.288,00	86,97	2,21
Jumlah Belanja	75.266.500.439,00	66.015.536.431,00	87,71	100,00

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.795.778.317,49	35.996.596.844,00	100,56
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.874.954,00	81.973.748,00	84,62
	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.998.060,00	7.604.500,00	69,14
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	-	4.892.000,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	-	3.307.500,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	-	3.304.286,00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	13.185.330,00	4.853.500,00	36,81
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.371.564,00	56.171.962,00	79,82
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000,00	1.840.000,00	79,31
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.505.112.925,00	5.411.859.259,00	98,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.482.781.035,00	5.397.067.215,00	98,44

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.133.000,00	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3.312.000,00	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.703.890,00	1.225.000,00	7,80
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.600.000,00	1.840.000,00	115,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.028.000,00	3.307.000,00	65,77
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		975.044,00	-
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.789.000,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.380.000,00	-
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.380.000,00	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.380.000,00	-
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.135.000,00	-
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.134.000,00	-
Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.380.000,00	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.539.000,00	-
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.539.000,00	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.741.460.523,00	2.393.915.897,00	87,32
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30.405.400,00	45.567.000,00	149,86
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.605.985,00	254.115.100,00	67,48
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		184.245.550,00	-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	361.704.300,00	357.518.800,00	98,84
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	107.581.000,00	47.871.200,00	44,50
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.865.163.838,00	1.504.598.247,00	80,67
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.263.989.293,00	1.340.084.800,00	106,02
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.263.989.293,00	1.340.084.800,00	106,02
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.457.289.327,99	1.603.008.489,00	110,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.939.000,00	9.981.500,00	100,43
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.105.097,00	342.047.881,00	122,99
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.169.245.230,99	1.250.979.108,00	106,99
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.250.278.636,00	2.134.654.698,00	94,86
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.564.539,00	199.088.695,00	152,48

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.351.293,00	373.422.670,00	115,84
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.567.723,00	154.682.483,00	79,09
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.601.795.081,00	1.407.460.850,00	87,87
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.517.511.502,00	21.799.802.220,00	106,25
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.325.271.502,00	21.615.272.220,00	106,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	163.440.000,00	163.510.000,00	100,04
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	28.800.000,00	21.020.000,00	72,99
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.963.261.156,50	1.213.969.733,00	61,83
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	47.109.886,50	43.830.938,00	93,04
	Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD	376.653.113,00	427.633.952,00	113,54
	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	537.946.497,00	383.517.922,00	71,29
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.001.551.660,00	358.986.921,00	35,84
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.285.407.345,00	30.018.939.587,00	106,13
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.880.149.646,00	4.959.582.260,00	84,34
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	735.409.436,00	955.320.480,00	129,90
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.461.352.225,00	2.659.903.585,00	76,85
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	932.164.079,00	847.363.845,00	90,90
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	502.495.590,00	496.994.350,00	98,91
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	248.728.316,00	-	-
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.299.938.178,00	2.243.863.861,00	97,56
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	338.933.717,00	402.521.490,00	118,76
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	336.179.789,00	370.150.010,00	110,10
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	684.963.923,00	628.933.503,00	91,82
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	461.588.217,00	415.067.107,00	89,92
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	1.000.000,00	2.277.000,00	227,70
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	477.272.532,00	424.914.751,00	89,03
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.600.681.759,00	5.963.610.147,00	106,48
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	930.652.666,00	860.685.181,00	92,48
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	981.608.006,00	954.519.612,00	97,24
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	942.990.425,00	988.707.999,00	104,85
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	868.129.152,00	918.976.827,00	105,86
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.334.900,00	3.060.000,00	131,05
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.596.881.599,00	2.016.558.825,00	126,28

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	278.085.011,00	221.101.703,00	79,51
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	5.140.615.619,00	6.734.268.949,00	131,00
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	2.882.455.679,00	2.815.923.689,00	97,69
Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.160.771.000,00	3.092.413.000,00	266,41
Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	218.509.200,00	216.000.000,00	98,85
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	826.282.140,00	584.544.000,00	70,74
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	52.597.600,00	25.388.260,00	48,27
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.551.890.905,00	5.876.829.357,00	105,85
Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	492.782.647,00	627.286.357,00	127,29
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	5.059.108.258,00	5.249.543.000,00	103,76
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	349.727.932,00	396.865.844,00	113,48
Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	173.807.110,00	183.267.580,00	105,44
Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	175.920.822,00	213.598.264,00	121,42
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.527.000,00	93.376.250,00	2.062,65
Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1.740.000,00	4.195.000,00	241,09
Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	2.787.000,00	89.181.250,00	3.199,90
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	3.457.876.306,00	3.750.542.919,00	108,46
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	627.072.124,00	421.890.759,00	67,28
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.740.000,00	3.450.000,00	198,28
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.555.325.915,00	1.864.944.872,00	119,91
Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.273.738.267,00	1.460.257.288,00	114,64
Jumlah Belanja	64.081.185.662,49	66.015.536.431,00	103,02

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pencapaian target menyesuaikan mobilitas dan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Operasional sebesar 87,60 % dari target disebabkan oleh:

- Belanja perjalanan dinas menyesuaikan mobilitas dan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
- Belanja BBM menyesuaikan kebutuhan dan mobilitas kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Bab III

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Rincian Objek	0	0

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan per Rincian Objek pendapatan, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.1.2 Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja	66.015.536.431,00	64.081.185.662,49
<i>Belanja Operasi</i>	<i>64.394.290.121,00</i>	<i>61.266.109.369,49</i>
Belanja Pegawai	27.012.339.435,00	25.808.052.537,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.525.643,00	2.744.156.788,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.726.541.572,00	2.738.624.247,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.303.272.220,00	20.013.271.502,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.000.000,00	312.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	37.381.950.686,00	35.458.056.832,49
Belanja Barang	7.557.357.593,00	6.885.729.955,00
Belanja Jasa	10.517.915.546,00	8.980.304.494,49
Belanja Pemeliharaan	2.115.492.500,00	1.764.005.122,00
Belanja Perjalanan Dinas	17.191.185.047,00	17.828.017.261,00
Belanja Modal	1.621.246.310,00	2.815.076.293,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.516.889.110,00	1.909.979.293,00
Belanja Modal Alat Besar		2.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.704.310,00	761.408.000,00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	807.439.800,00	594.859.300,00
Belanja Modal Komputer	493.745.000,00	551.211.993,00
Belanja Gedung dan Bangunan	99.926.000,00	577.923.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	99.926.000,00	577.923.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.431.200,00	327.174.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.431.200,00	207.532.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.431.200,00	119.642.000,00

Penjelasan :

Uraikan realisasi belanja per Rincian Objek belanja, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.1.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Rincian Objek ...	0	0

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.4	Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Beban	151.806.621.927,75	73.456.478.047,96
	Beban Operasi	64.193.629.674,16	61.109.832.721,29
	Beban Pegawai	27.012.339.435,00	25.808.052.537,00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.525.643,00	2.744.156.788,00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.726.541.572,00	2.738.624.247,00
	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.303.272.220,00	20.013.271.502,00
	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.000.000,00	312.000.000,00
	Beban Barang dan Jasa	37.181.290.239,16	35.301.780.184,29
	Beban Barang	7.559.457.002,16	6.728.954.448,80
	Beban Jasa	10.492.429.690,00	8.980.803.352,49
	Beban Pemeliharaan	1.902.218.500,00	1.764.005.122,00
	Beban Perjalanan Dinas	17.227.185.047,00	17.828.017.261,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	87.612.992.253,59	12.346.645.326,67
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	910.135.785,64	1.940.512.473,42
	Beban Penyusutan Alat Besar	11.927.219,81	19.440.296,75
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	294.183.851,74	619.363.780,14
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	557.000,00	1.114.000,00
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	87.500,00	175.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	364.792.415,00	887.746.823,21
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	36.669.600,00	63.962.100,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.964.200,00	9.718.000,00
	Beban Penyusutan Komputer	196.953.999,09	338.992.473,32
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.702.856.467,95	10.406.132.853,25
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	125.506.722,65	251.013.445,30

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.1.5 Aset

No	Uraian / Jenis Aset	Saldo Awal 2023	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	0	0	0	0
	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	17.043.489.814,94	2.321.089.110,00	1.251.963.002,14	18.112.615.922,80
	Alat-alat Berat	594.738.151,03	1.900.000,00	0	596.638.151,03
	Alat-alat Angkutan	5.733.492.789,36	797.500.000,00	499.657.806,60	6.031.334.982,76
	Alat Bengkel dan alat ukur	11.140.000,00	0	0	11.140.000,00
	Alat Pertanian	700.000,00	0	0	700.000,00
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	7.418.754.359,55	417.844.110,00	541.985.827,63	7.294.612.641,92
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	796.468.447,54	610.100.000,00	31.155.000,00	1.375.413.447,54
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	73.411.000,00	0	23.769.000,00	49.642.000,00
	Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0
	Alat Persenjataan	0	0	0	0
	Komputer	2.414.785.067,46	493.745.000,00	155.395.367,91	2.753.134.699,55
	Alat Eksplorasi	0	0	0	0
	Alat Pengeboran	0	0	0	0
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	0
	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	0
	Alat Keselematan Kerja	0	0	0	0
	Alat Peraga	0	0	0	0
	Peralatan Proses Produksi	0	0	0	0
	Rambu-rambu	0	0	0	0
	Peralatan olah raga	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan				0
3	Gedung dan Bangunan	10.987.465.580,15	0	0	10.987.465.580,15
	Bangunan Gedung	10.987.465.580,15	0	0	10.987.465.580,15
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	Bangunan Menara	0	0	0	0
	Tugu titik kontrol/pasti	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan				0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
	Jalan dan jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	0	0	0	0
	Jaringan	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan				0
5	Aset Tetap Lainnya	455.740.520,01	4.431.200,00	0	460.171.720,01
	Bahan Perpustakaan	257.177.520,01	4.431.200,00	0	261.608.720,01
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	198.563.000,00	0	0	198.563.000,00
	Hewan	0	0	0	0
	Biota Perairan	0	0	0	0
	Tanaman	0	0	0	0
	Barang koleksi non budaya	0	0	0	0
	Aset tetap dalam renovasi	0	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0			0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0			0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
2	Aset Lainnya	279.315.500,00	635.711.695,59	635.711.695,59	279.315.500,00
	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	279.315.500,00	0	0	279.315.500,00
	Aset Tidak Berwujud	279.315.500,00	0	0	279.315.500,00
4	Aset Lain-Lain	0	635.711.695,59	635.711.695,59	0
	Aset Lain-Lain	0	635.711.695,59	635.711.695,59	0
	JUMLAH	28.766.011.415,10	3.596.943.701,18	2.523.386.393,32	29.839.568.722,96

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	(579.817.498,00)	23.118.358,00
Utang Belanja	(579.817.498,00)	23.118.358,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	(492.067.498,00)	23.118.358,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	(159.200.000,00)	
Utang Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	(60.000.000,00)	

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	454.694,00	476.276,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	33.177.808,00	22.642.082,00
Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	(306.500.000,00)	
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(87.750.000,00)	
Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	(87.750.000,00)	

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban selama tahun berjalan.

3.1.7	Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	EKUITAS AWAL	16.619.737.302,44	15.242.221.379,84
	RK PPKD	66.015.536.431,00	64.081.185.662,49
	Surplus/Defisit-LO	(65.229.272.182,45)	(63.301.358.640,01)
	Ekuitas Mutasi Persediaan	0,00	(0,04)
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(3.547.000,00)	(968.016.969,89)
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(4.245.557,40)	1.421.255.020,05
	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	0,00	144.450.850,00
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	17.398.208.993,59	16.619.737.302,44

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 35 Tahun 2023, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bab V

Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari target Rp xx yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp xx atau xx% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 66.016.168.131,00 atau 87,71% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 64.394.921.821,00 atau sebesar 87,60% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 27.845.074.200,00 terealisasi sebesar Rp 27.012.339.435,00 atau 97,01% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 45.662.195.139,00 terealisasi sebesar Rp 37.382.582.386,00 atau sebesar 81,87% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.621.246.310,00 atau 92,16% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 16.818.391.495,59 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 200.678.930,00, Aset Tetap sebesar Rp 16.319.423.415,59 dan Aset Lainnya sebesar Rp 298.289.150,00.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp (579.817.498,00), yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 17.398.208.993,59.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp xx yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp xx.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 65.229.272.182,45 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 64.193.629.674,16, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp xx.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp (65.229.272.182,45)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 16.619.737.302,44 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp (65.229.272.182,45) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp (7.792.557,40) terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp(3.547.000,00) dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp (4.245.557,40)

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 17.398.208.993,59 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.



Yogyakarta, 31 Desember 2023

Sekretaris DPRD

Basuki Hari Saksono, SH
NIP. 19641111 199003 1 013